

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- , Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghali Indonesia, Jakarta, 1991.
- Etty Indriarti, Pola dan Akar Korupsi Menghancurkan Lingkungan Setan Dosa Publik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.
- Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Edisi Dua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005
- I.G.M Nurdjana, Korupsi Dalam Praktik Bisnis, Pemberdayaan Pengeakan Hukum, Program Aksi Dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Kurniawan, F. Budi. *Perkembangan Doktrin Sanksi Pidana Tambahan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Laksbang Justitia, 2020.
- Lubis, M. Deliar, dkk. *Masalah-Masalah Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Mansyur Semma, Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik, Edisi Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Yogyakarta, 2008.

- Marwan Mas, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ghali Indonesia, Jakarta, 2014.
- Maya Indah, Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, Kencana, Jakarta, 2006.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, Teori – Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2005.
- Mulkan, Hasanah. Hukum Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Prenada Media Group, 2022.
- O. Notohamidjojo, Soal – Soal Pokok Filsafat Hukum, Griya Media, Salatiga, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Rodliyah dan Salim, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya, Ctk. Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2017.
- Renggong, Ruslan. Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-delik di Luar KUHP). Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- Suharto, Junaidi Efendi, Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Suteki, Gala Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Rajawali Press, Depok, 2018.
- Suyatno, Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.

Soerjono Soekanto, Marmudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Ctk. Ketujuh Belas, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

Jurnal

Wendy, Andi Najemi, "Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi", *PampasL Journal of Criminal, Edisi No. 1* Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2020.

Damanik, Kristwan Genova. "ANTARA UANG PENGGANTI DAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 1, 2016.

Noviyanti, Rahma, dkk. "Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 1, 2019.

Rahmat, Diding. "Formulasi Kebijakan Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,". Volume 8 No. 1, April 2020

Perspektif Penerapan Sanksi Pidana Atas Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi - Asosiasi Penelitian Dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia, "*Suatu prinsip dalam hukum 'siapa yang membuat rugi kepadanya harus dimintakan pengembalian atas kerugian tersebut.' Hal ini dapat dilihat jelas dalam konsideran dan penjelasan UUPTPK menekankan agar tidak terjadi penyimpangan atas keuangan negara...*"

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang – Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang

Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Internet

[Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini! - ACLC KPK](#), diakses pada 23

Januari 2024.

Wawancara

I Wayan Wahyudistira, SH jaksa Pinsus Kejaksaan Tinggi DIY